



Analysis Of Policy Implementation Of The Service Of Youth And Sports In An Effort To Increasing Athletes Achievement In Bengkulu Province

Analisis Implementasi Kebijakan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Atlet Provinsi Bengkulu



Henny Aprianty^a
Diky Mariantoy^b
Dodo Sutardi^c
Rahiman Dani^d
Heru Purnawan^e

Article history:

Submitted: 09 October 2022

Revised: 21 October 2022

Accepted: 19 November 2022

Keywords:

Implementation, Sports Service Policy

Abstract

The implementation of the Youth and Sports Service's policy regarding the development of achievement sports human resources is the basis for every sports actor to improve his performance. Improvement of sports achievements which have the duties and functions contained in the Bengkulu Governor Regulation Number 43 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure of Duties and Functions as well as the work procedures of the Youth and Sports Office. The purpose of this study was to determine the implementation of policies and to understand the obstacles faced in implementing the policies of the Department of Youth and Sports in an effort to improve the achievements of Bengkulu Province athletes. The method used is descriptive qualitative with research subjects Analysis of Youth and Sports Service Policy Implementation about improving athlete achievement. The population in this study found 9 people. The sources of data in this study are documents on sports policy, observations, and interviews with the Head of the Youth and Sports Office, Head of Youth Development, Head of Sports Achievement Improvement, Head of UPTD Management and Development of Youth and Sports Facilities and Infrastructure (P2SPKK), Chairperson General KONI Bengkulu, and athletes. The results showed that the implementation of the Youth and Sports Office policy was good with training programs and giving rewards but running optimally. The obstacles to efforts to improve athlete achievement were seen by the lack of budget provided, lack of support from the sports industry in improving athlete achievement and facilities and infrastructure. insufficient

^a Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

^b Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

^c Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

^d Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

^e Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

exercise.

Abstrak

Implementasi kebijakan Dinas Pemuda Dan Olahraga tentang pembinaan sumber daya manusia bidang olahraga prestasi merupakan dasar dari setiap pelaku olahraga untuk senantiasa meningkatkan prestasinya. Peningkatan prestasi olahraga yang memiliki tugas dan fungsinya yang tertuang pada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dan memahami kendala yang dihadapi implementasi kebijakan Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam upaya peningkatan prestasi atlet Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Dinas Pemuda Dan Olahraga tentang peningkatan prestasi atlet. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen tentang kebijakan olahraga, observasi, dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kepala UPTD Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan (P2SPKK), Ketua Umum KONI Bengkulu, dan Atlet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam peningkatan atlet sudah cukup baik dengan program latihan dan pemberian reward namun belum berjalan secara optimal, Adapun kendala upaya peningkatan prestasi atlet terlihat dengan minimnya anggaran yang diberikan, kurangnya dukungan dari industri olahraga dalam peningkatan prestasi atlet dan sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai.

Journal of Social Science and Humanities © 2022.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Henny Aprianty

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

Email address: henny@unihaz.ac.id

1 Pendahuluan

Olahraga merupakan segala aktivitas fisik yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mendorong, membina dan mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (Makmum 2016, Mutohir & Maksum 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa keolahragaan Nasional bertujuan memelihara serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, mutu manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan Nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Keterkaitan dengan sistem keolahragaan nasional bahwa kondisi sekarang bisa dikatakan jauh dari yang diharapkan. Tujuan yang diinginkan masih jauh dari yang diinginkan karena masih kurang perhatian pemerintah

dalam mengembangkan sarana prasana olahraga. Terlihat dari minimnya prestasi yang diraih oleh para atlet daerah. Pengembangan olahraga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah ataupun peran dari pemangku kepentingan lainnya yang bergerak di bidang keolahragaan. Tanpa adanya dukungan tersebut mustahil pencapaian peningkatan prestasi atlet dalam olahraga berjalan dengan optimal. Sehingga masalah ini sangat serius untuk segera dilaksanakan penanganan yang cepat dan tepat guna membantu proses kemajuan peningkatan atlet berprestasi. Adapun hasil PON XX Papua Tahun 2021 Bengkulu memastikan 12 medali : 1 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Capaian itu menempatkan Bengkulu di peringkat ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia. Secara kuantitas, perolehan medali Bengkulu di PON Papua memang meningkat dibanding capaian medali di PON-PON sebelumnya. Namun di sisi lain, target bisa finish di peringkat 25 belum bisa digapai, sumber informasi (<https://rri.co.id>).

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan. Oleh karena itu guna meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku pemerintah pusat memberikan tugas dan wewenang kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dari pemerintah pusat.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bengkulu yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan olahraga. Tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 21 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang berisi pembinaan dan pengembangan olahraga, maka pemerintah daerah yang sudah mendapat wewenang wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, bab 2 pasal 2 dan pasal 3, dan 4, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Type A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga menjalankan tugas, pokok dan fungsi serta visi dan misi dari Dinas pendidikan pemuda dan olahraga Provinsi Bengkulu. Dilihat dari kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana bagi setiap cabang olahraga dan itu sangat berimplikasi buruk terhadap pembangunan atlet dalam meningkatkan prestasi dan menjadi atlet professional. Pencapaian prestasi atlet ditentukan dan perlu didukung oleh kebijakan keolahragaan yang berpihak pada peningkatan prestasi atlet dari setiap cabang olahraga.

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang ditetapkan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam upaya peningkatan prestasi atlet Provinsi Bengkulu Tahun 2021. Untuk memahami kendala yang dihadapi implementasi kebijakan Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam upaya peningkatan prestasi atlet Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang subjek penelitian secara holistik dengan menggambarkan kata-kata dan bahasa sesuai dengan situasi aktual. Berdasarkan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moloeng, 2007) mengemukakan Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari manusia dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Data deskriptif dimana memberikan gambaran kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah kebijakan peningkatan prestasi atlet oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Bengkulu.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, dengan waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (satu) bulan yakni dari bulan Februari 2022 sampai bulan April 2022. Adapun alasan peneliti memilih Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu sebagai lokasi penelitian adalah bertugas dan berfungsi sebagai pengoordinasi perumusan kebijakan teknis pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Bengkulu.

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian (Burhan Bungin, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci dan informan tambahan yaitu sebagai berikut :

1. Informan kunci (key informan) yang dilakukan pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, yaitu ; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.
2. Informan Utama yang dilakukan pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu terdiri dari ; Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kepala UPTD Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan (P2SPKK).
3. Sedangkan informan tambahan yang dilakukan pada Kantor KONI Provinsi Bengkulu, terdiri dari : Ketua Umum KONI Bengkulu, Putu Martika Atlet Binaraga, dan Lia Anjelia Atlet Karate.

3 Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan di lapangan pemerintah sudah melaksanakan kebijakan pembinaan olahraga dilakukan Dispora, Koni dan Cabang olahraga yang terdaftar di Koni, tetapi dalam pembinaan tersebut masih banyak yang kurang yaitu perhatian pemerintah terhadap cabang olahraga yang berprestasi dan unggulan masih kurang. Hal itu dibuktikan dengan pemberian bonus atlet berprestasi yang belum sesuai yang diharapkan. Masalah lain yang dihadapi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan adalah regulasi dari pemerintah belum dijalankan oleh cabang olahraga dan adanya perbedaan mindset antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Masalah pendanaan dan anggaran untuk pembinaan olahraga prestasi di Bengkulu ini terbatas dan sesuai anggaran di APBD.

Berdasarkan temuan peneliti peningkatan prestasi atlet berdasarkan Teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009) Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

(1) Komunikasi

Meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga telah dilaksanakan pembinaan olahraga di kalangan pelajar termasuk pelajar penyandang cacat, organisasi olahraga dan masyarakat dan meningkatnya jumlah pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi serta meningkatnya jumlah dan mutu bibit olahragawan. Pemilihan atlet yang masuk dalam pembinaan atlet berbakat ini dilakukan dengan seleksi yang dilakukan secara bersama-sama dari tes umum hingga tes sesuai kecabangan masing-masing, pembinaan dilakukan selama 5 bulan.

Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu akan menggelar Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda) untuk mempersiapkan atlet menghadapi gelaran akbar seperti PON.

(2) Sumberdaya

Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi namun kurang adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

(3) Disposisi

Para pelaksana program peningkatan prestasi atlet yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu selalu tanggap menangani situasi di cabang olahraga dengan memfasilitasi Pelatih memberikan latihan secara rutin untuk membantu meningkatkan performa para atlit di setiap cabang olahraga. secara keseluruhan pola penerapan teknik supervisi oleh pengelola dan pelatih kepada atlet binaan diterapkan melalui inspirasi, semangat, dan dorongan kepada atlet untuk mengambil tindakan-tindakan. Pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk mengingatkan atlet-atlet agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana yang dicita-citakan dan diharapkan dari atlet yakni peningkatan motivasi untuk berprestasi olahraga

(4) Struktur Birokrasi

Standar Operating Procedures (SOP) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksanakebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan). Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu belum memiliki Standar Operating Procedures (SOP) kebijakan peningkatan prestasi atlet yang seesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan pada pelaksanaan yang diberikan harus menggunakan SOP yang berlaku.

4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas diketahui bahwa penerapan kebijakan pemerintah dalam pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Bengkulu dapat disimpulkan sebagai berikut. Kebijakan Pemerintah dalam pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Bengkulu belum relevan dengan kebutuhan atlet.

Kebijakan Pemerintah dalam manajemen organisasi olahraga prestasi di Provinsi Bengkulu belum relevan dengan kebutuhan Pengurus Cabang Olahraga (PENG CAB) dan atlet. Kebijakan Pemerintah dalam penganggaran dana pembinaan belum relevan dengan kebutuhan cabor dan atlet. Hal ini sarana dan prasarana yaitu alat-alat yang digunakan dalam proses pembinaan Atlit untuk menjalankan program olahraga prestasi di Provinsi Bengkulu belum terpenuhi dengan baik serta dalam pemberian penghargaan belum relevan dengan keinginan Pengurus Cabang Olahraga (PENG CAB) dan atlet. Dinas Pemuda dan Olahraga Bengkulu sebagai pelaksana kebijakan belum memiliki SOP yang sesuai dengan Implementasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi. SOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja bagi organisasi dalam hal pelayanan publik khususnya untuk para atlet pelajar menuju terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih berkualitas.

Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan agar supaya dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga harus dapat memfokuskan terhadap pembangunan sarana dan prasarana untuk pembinaan atlet agar cepat terselesaikan serta dapat mendata atlet-atlet yang ada agar supaya semua atlet berprestasi dapat memiliki bantuan dalam bentuk buku tabungan. Pemerintah harus dapat menyediakan SOP dalam pembinaan atlet dan mempertahankan kebijakan seperti mengadakan POPDA setiap tahun agar supaya kegiatan tersebut tetap dilaksanakan setiap tahun.

5 Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 144 145.
- Barry Berman, Joel R.Evans, (2001). Retail Management eight edition, Penerbit Intermedia (terjemahan), Jakarta.
- Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Edward, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC. Congressional Quarterly Press.
- Hamid, P. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Harbani Pasolong. (2010). Teori administrasi publik. Bandung : Alfabeta
- M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 17
- Merriam, Sharan B. 2009. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. Jossey-Bass. San Francisco
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ortiz, I., Alfonso, J. C. R., & Luis, J. C. M. (2015). Sport Management, Leadership in The Organization. Journal of Physical Education and Sports Management (2)
- Riant Nugroho. (2017). Public Policy: edisi 6. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sajoto. (1995). Peningkatan dan Pembinaan Kekuatan Kondisi Fisik dalam Olahraga. Jakarta: Dahari Prize.
- Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 40
- Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwati, Lilik. (2007). Mental Juara: Modal Atlet Berprestasi. Jakarta: Rajawali Sport.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : PT Alfabet.
- Tanzeh A. dan Suyitno. 2006. Dasar-Dasar Penelitian. Elkaf. Surabaya.
- Tresiana Novita dan Duadji Noverman. 2017. Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-model Pengelolaan Pengembangan Daerah. Yogyakarta : Suluh Media. Hal 54.
- Winarno B. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS. Yogyakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.